

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan di suatu Negara akhir-akhir ini merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah. Banyak upaya dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas atau akses pendidikan bagi penduduknya yang telah diwakilkan kepada Dinas pendidikan. Mengingat pendidikan memegang peranan penting dalam masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah seyogyanya aspek ini menjadi pusat perhatian pemerintah dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, sedari awal founding fathers negeri ini telah memasukkan pendidikan ke dalam konstitusi dan menjamin setiap warga negara memiliki hak dalam hal akses pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 mempertegas hal tersebut, dalam arti bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan hak untuk mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Sehingga sangat penting dalam menentukan relevan tidaknya program yang sedang diupayakan.

Dengan besarnya perhatian itu pula yang menjadikan pemerintah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana pendidikan sebesar minimal 20% dari

APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% APBD, di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan (Amrullah,2007;01).

Maka dengan rangka mengemban amanah tersebut berbagai kebijakanpun dilakukan pemerintah, baik dengan pengupayaan peningkatan mutu maupun penciptaan akses pendidikan yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam lingkup sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), kebijakan yang telah dilakukan pemerintah diantaranya: Program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) serta revitalisasi gedung sekolah dasar, yakni peningkatan layanan sarana dan prasana pendidikan terhadap anak-anak usia sekolah yang dilakukan dengan memberikan bantuan biaya operasional (BOS) (Amrullah,2007;02).

Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Damsar,2011;08). Dalam sosiologi pendidikan juga mengatakan bahwa di dalam pendidikan pasti menyangkut masyarakat yang terdapat proses dan pola interaksi sosial yang mempunyai keterkaitan dan timbal balik antara keduanya (Damsar, 2011;09). Sehingga pendidikan dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Damsar,2011;204).

Ketika membahas pendidikan, lembaga atau sekolah merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) yang dilakukan

secara sistematis, praktis dan berjenjang. Ada banyak cara untuk memberikan pendidikan kepada anak, baik secara formal maupun nonformal. pendidikan formal tidak sebatas dengan memberikan pengetahuan dan keahlian kepada anak-anak mereka di sekolah, melainkan pendidikan non formal juga dapat menanamkan tata nilai yang menimbulkan budi pekerti yang luhur dan ahlak yang mulia, norma-norma, cita-cita, tingkah laku dan aspirasi dengan bimbingan orang tua di rumah. Dari jenjang pendidikan formal yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan, seperti wajib belajar pendidikan sembilan tahun yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah dapat menggali suatu potensi yang tersimpan didalam diri seseorang, sehingga dapat dikembangkan dalam mencapai tujuannya. Terdapat beberapa jenjang di Indonesia yaitu, pendidikan dasar yang ditempuh selama 9 (Sembilan) tahun yang meliputi sekolah dasar (SD) serta sekolah menengah pertama (SMP) atau bentuk lainnya yang sederajat.

Manusia pada umumnya bercita-citakan agar ada perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Akan tetapi cita-cita tersebut selalu akan tertumbuk pada suatu kenyataan yang berlainan. Sehingga masyarakat harus menempatkan individu-individu pada tempat-tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai akibat penempatan tersebut (Soerjono Soekanto, 1982; 213). Sama halnya dengan suatu lembaga atau sekolah. ketika suatu lembaga atau sekolah ingin menjaga bahkan meningkatkan akreditasinya lebih standar nasional, maka ia harus berupaya untuk mewujudkan pendidikan yang ada didalamnya

lebih kompetensi dan professional, sehingga dapat diuji keahlian yang dimilikinya, seperti memfasilitasi kelangsungan belajar contohnya ruang kelas yang terstruktur, media pembelajaran yang modern (LCD, metode pembelajaran dan lain-lain), jumlah pengajar dan guru yang profesional dan dapat diuji keahlian kompetensi yang dimilikinya, jumlah siswa juga mempengaruhi dalam keberhasilan dan kelangsungan belajar. Selain itu kurikulum berbasis kompetensi (KBK) juga berpengaruh terhadap kelulusan siswa pertahunnya.

Madura adalah sebuah nama pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur dan mempunyai 4 (empat) kabupaten diantaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Pademawu merupakan salah satu Kecamatan yang mempunyai 2 (dua) kelurahan dan 22 (dua puluh dua) Desa yang tidak lepas dari peranan dan sosialisasi masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sehingga tidak lepas dari pendidikan atau pengetahuan dalam berinteraksi. Mengenai Pendidikan di daerah Pademawu tidak jauh beda dengan pendidikan di daerah lainnya yang sama-sama mengacu pada pendidikan berstandart nasional. Selain itu Pademawu juga bisa dikatakan lebih maju karena tidak lain kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Sehingga banyak orang tua menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan sampai yang lebih tinggi seperti sekolah SMP (sekolah menengah pertama).

Berdasarkan data BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) pada tahun 2012 yang telah penulis olah, dari hasil persentase

99,61% masyarakat Kelurahan Lawangan Daya telah meningkatkan pendidikan yang telah diwajibkan oleh peraturan pemerintahan, dan 0,39% masyarakat masih belum meningkatkan pendidikan tersebut. Sedangkan di Desa Pagagan 89,00% masyarakat yang meningkatkan pendidikan dan 11,00% masyarakat tidak bersekolah. Dalam artian di Desa Pagagan anak dari usia 7 sampai 15 tahun yang masih senang-senanganya memperoleh bimbingan dan didikan untuk membentuk suatu pengetahuan, sikap, nilai dan norma, malah di alihkan pada suatu pekerjaan atau kegiatan yang terkadang harus dilakukan oleh orang tua, seperti membantu orang tuanya mencari nafkah sekeluarga. Sehingga banyak terdapat perbedaan dalam pemahaman dan bersosialisasi antar masyarakat lainnya (Damsar,2011;70).

permasalahan yang menjadi penelitian disini adalah apakah masih ada perbedaan dalam kelangsungan belajar, padahal pemerintahan telah memberikan bantuan yang berupa Bantuan operasional sekolah (BOS). Sehingga tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari perbedaan kelangsungan belajar anak wajib sekolah 9 (sembilan) tahun di Masyarakat Kelurahan Lawangan Daya dan di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dengan kata lain indikator yang penulis fokuskan adalah bagi Kepala Keluarga (KK) yang mempunyai anak usia 7 sampai 15 tahun dan wajib sekolah sembilan tahun. Maka penulis memilih judul Kelangsungan belajar anak yang wajib sekolah 9 (sembilan) tahun di Masyarakat Kelurahan Lawangan Daya dan di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kelangsungan belajar anak usia wajib sekolah 9 (Sembilan) tahun di Masyarakat Kelurahan Lawangan Daya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelangsungan belajar anak usia wajib sekolah 9 (sembilan) tahun di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ?
2. Mengapa ada perbedaan kelangsungan belajar anak usia wajib sekolah 9 (sembilan) tahun di masyarakat Kelurahan Lawangan Daya dan di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana kelangsungan belajar anak usia wajib sekolah 9 (Sembilan) tahun di Masyarakat Kelurahan Lawangan Daya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelangsungan belajar anak usia wajib sekolah 9 (sembilan) tahun di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui mengapa ada perbedaan Kelangsungan Belajar Anak Usia Wajib Sekolah 9 (sembilan) tahun di Masyarakat Kelurahan Lawangan Daya dan di Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Di samping tujuan yang ingin hendak di capai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukannya yaitu:

1. Bagi penulis

Diperoleh pengetahuan dan pengalaman praktis dari upaya identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan pentingnya pendidikan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut, yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

3. Bagi masyarakat

Dapat digunakan sebagai solusi dalam upaya meningkatkan pentingnya pendidikan kepada anak didik mereka khususnya di kelurahan Lawangan Daya dan Desa Pagagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.